

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil observasi peneliti dan wawancara yang telah dilakukan pada 5 informan yakni Plt. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Administrasi Jakarta Selatan periode 2020-2025, Ketua Harian Dewan Perwakilan Daerah Partai Golkar, Anggota Legislatif DPRD Provinsi DKI Jakarta Fraksi Partai Golkar periode 2024-2029, Ketua Pimpinan Kecamatan Partai Golkar, dan masyarakat konstituen, maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini yakni: 1) Komunikasi partisipatif dalam penyusunan program kerja Partai Golkar, dan 2) Hambatan komunikasi partisipatif dalam penyusunan program kerja Partai Golkar.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam proses penyusunan program kerja Partai Golkar, bentuk komunikasi partisipatif yang dilakukan adalah dialog. Dialog dalam penyusunan program kerja Partai Golkar dilakukan secara internal dengan arah komunikasi vertikal atau *up to down*, dimana adanya dialog atau komunikasi dalam rapat terstruktur di kepengurusan internal Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang melibatkan ketua, ketua harian, sekretaris, bendahara, dan kepala bidang. *Stakeholders* internal lainnya yakni adanya dialog yang dibangun dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), dan pengurus Partai Golkar di tingkat kecamatan dan kelurahan. Selain itu juga terdapat dialog yang dilakukan dengan Anggota Fraksi Partai Golkar dengan arah komunikasi horizontal dengan tujuan untuk menjangkau aspirasi masyarakat yang didapat oleh DPRD. Sedangkan, dialog dalam penyusunan program kerja Partai Golkar dilakukan secara eksternal adalah masyarakat dengan arah komunikasi yakni vertikal atau *down to up*. Aspirasi masyarakat didapatkan secara tidak langsung melalui PK, PL, Korte, Korwe, dan reses oleh Anggota Dewan Fraksi Partai Golkar.

Komunikasi partisipatif dalam penyusunan program kerja Partai Golkar telah terlaksana, tetapi belum optimal. Komunikasi masih dominan bersifat vertikal (*top-down*), sehingga masyarakat hanya terlibat dalam dialog tanpa peran dalam pengambilan keputusan, inventarisasi permasalahan dan diskusi mengenai solusi, namun untuk pengambilan keputusan mengenai program kerja Partai Golkar diputuskan secara internal pihak DPD. Selain itu, proses komunikasi partisipatif

dalam pelaksanaan dan evaluasi juga sudah berjalan, namun belum secara menyeluruh.

Dampak positif komunikasi partisipatif meliputi program yang lebih tepat sasaran, investasi jangka panjang untuk pemilu, peningkatan edukasi masyarakat mengenai peran partai, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap partai. Sedangkan, dampak negatif yang didapatkan yakni tantangan dalam mengakomodir beragamnya aspirasi masyarakat dan meningkatnya dana operasional.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat hambatan dalam penyusunan program kerja Partai Golkar yakni kurangnya dana yang dimiliki. Selain itu, terdapat kesenjangan antara masyarakat dan kader, serta adanya miskonsepsi antara Korwe, Korte, dan jajaran pengurus atas Partai Golkar menjadi hambatan dalam penyusunan program kerja. Oleh karena itu, temuan penelitian menunjukkan bahwa perlunya membuat kegiatan akar rumput atau kegiatan yang melibatkan masyarakat dengan kader, serta pembinaan kepada organisasi masyarakat dan kader Partai Golkar. Hambatan lainnya yakni proses administrasi dalam pendataan aspirasi masih dilakukan secara manual. Oleh karena itu perlunya integrasi teknologi dalam membantu proses administrasi agar lebih efektif dan efisien.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Akademis

Secara akademis, Melalui penelitian ini, peneliti menegaskan urgensi penginternalisasian komunikasi partisipatif dalam organisasi politik. Penerapan komunikasi partisipatif dinilai sebagai strategi yang efektif bagi partai politik dalam merumuskan program kerja hingga kebijakan yang akan diperjuangkan di tingkat pemerintahan. Lebih jauh, komunikasi partisipatif memungkinkan terjadinya keterlibatan publik secara lebih luas, sehingga membuka ruang kontribusi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik yang bersifat representatif dan inklusif.

5.2.2 Saran Praktis

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti untuk Partai Golkar dan partai politik lainnya yakni perlunya membangun komunikasi partisipatif yang baik dengan masyarakat, baik dalam proses penyusunan maupun pelaksanaan program kerja. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai, meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam program partai,

dan meningkatnya eksistensi dan elektabilitas partai di masyarakat. Untuk itu, peneliti menyarankan beberapa pendekatan yang dapat dilakukan secara konkret oleh Partai Golkar dan partai politik lainnya yakni:

1. Memperbanyak ruang-ruang diskusi/perjumpaan antara partai dengan masyarakat;
2. Meningkatkan keterlibatan serta koordinasi dengan anggota legislatif;
3. Mengoptimalkan penggunaan media sosial dan *platform* digital sebagai saluran untuk menjaring dan mengumpulkan aspirasi masyarakat.